

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KELURAHAN MINASA
TE'NE, KECAMATAN MINASA TE'NE, KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Mencapai Derajat Sarjana Strata 1
Departemen Ilmu Pemerintahan**



Oleh:

**NURUL ISLAMIYAH M
E051201031**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KELURAHAN MINASA
TE'NE, KECAMATAN MINASA TE'NE, KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL ISLAMIYAH M

E051201031

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199101 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Suhardiman Svamsu, M.Si
NIP. 19680411 200012 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199101 1 001



Dipindai dengan CamScanner

ii

LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KELURAHAN MINASA
TE'NE, KECAMATAN MINASA TE'NE, KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN

Dipersiapkan dan di susun oleh

Nurul Islamiyah M

E051201031

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 26 April 2024

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Sekretaris : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.Ip., M.Si.

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si.



Dipindai dengan CamScanner

iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Islamiyah M

NIM : E051201031

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Karya Tulis yang berjudul :

**“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KELURAHAN MINASA
TE'NE, KECAMATAN MINASA TE'NE, KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN”**

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar0benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan



Nurul Islamiyah M



Dipindai dengan CamScanner

iv

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kelurahan Minasa Te’ne, Kecamatan Minasa Te’ne, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungandari berbagai pihak.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap perjuangan.



ada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih keluarga tercinta, kasih sayang yang tak terhingga dan penghormatan yang

sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, yakni ibunda Chuderiah atas segala perjuangan mendidik, membesarkan penulis sampai pada saat ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi, juga kepada ayahanda Alm. Abdul Malik yang tak kenal lelah penulis doakan agar dapat tenang di alam yang berbeda ini, serta Kakak saya Siti Hutami Malik dan Wahyu Hidayat Malik yang selalu mendorong saya agar cepat menyelesaikan studi. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.



4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kantor Kelurahan Minasa Te'ne.
9. Terima kasih untuk sahabat rasa saudara mulai dari SMP sampai satu almamater hingga saat ini Dilla meskipun kita berada di fakultas yang berbeda, terima kasih telah memberikan motivasi kepada penulis,



dukungan dan menjadi pendengar yang baik serta bertukar cerita atas keluh kesah, baik terkait perkuliahan hingga kehidupan.

10. Kepada Sahabat SMA : Ica, Tasya, dan Febri (Lolato) yang walaupun udah jarang ketemu karena kesibukan masing-masing, mari tetap saling merayakan satu sama lain, pendengar yang baik, agar kesendirian itu tidak pernah tercipta
11. Juga kepada teman seperjuangan saya di bangku perkuliahan Umma, Alya, Anni, dan Ayu yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga kepenulisan skripsi ini, tetap menjadi tempat penyebar ilmu yang baik, tempat berkeluh-kesah
12. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis PEJUANG LAMARAN : Nahdya, Andar, Puji dan Dilla atas kebersamaan dari SMP dan Alhamdulillah bertahan hingga saat ini dan semoga hingga akhir hayat yang telah memberikan pengalaman satu sama lain dan pembelajaran hidup.
13. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan “Maintedrai” 2020 atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju.



epada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pare-Pare Gelombang 10 khususnya posko Bukit Indah yaitu Arsy, Muse, Ronald, Dilla, Karin,

Kiky, Mega, Nisa, Tiqo, Aisyah, Zhures serta teman-teman posko Kecamatan Soreang. Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman selama proses pelaksanaan KKN di Kabupaten Pare-pare. Semoga tetap diberi kesehatan dan waktu serta tetap sudi untuk di ajak bertemu.

15. Terima kasih untuk orang-orang baik disekeliling saya, yang pernah dan masih ada sampai saat ini untuk menjadi teman jalan dan bercerita.
16. Terakhir, Teruntuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan hingga detik ini. Terima kasih telah kuat bertahan dengan kerasnya kehidupan di dunia ini. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan semoga bisa menjadi orang sukses dalam menggapai cita-cita yang diinginkan. Aamiin

Makassar, 26 April 2024

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	12
2.2 Partisipasi Masyarakat	16
2.3 Efektivitas	21
2.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan.....	23
2.3.2 Pendekatan untuk mengukur Efektivitas.....	27
2.4 Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Sumber Data Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	39
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, paten Pangkajene dan Kepulauan	50
ahasan.....	53
atis	75



2. Terpadu	82
3. Transparan.....	90
4. Akuntabel	96
BAB V PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	116



DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir.....	29
Profil Kelurahan Minasa Te'ne.....	51
Struktur Pemerintahan Kelurahan Minasa Te'ne.....	52
Absensi Kehadiran Peserta Musrenbang Tahun 2024.....	58
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangkep.....	83
Usulan Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne Tahun 2023.....	85
Usulan Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne yang naik ke Kecamatan.....	91
Usulan yang terealisasi.....	98
Alur Usulan Musrenbang.....	104



ABSTRAK

Nurul Islamiyah M, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Dibimbing Oleh Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan meninjau secara sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti wawancara, observasi langsung dan partisipatif, serta analisis teks, penelitian kualitatif ini mampu untuk menangkap nuansa dan kerumitan dari fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Minasa Te'ne masih belum efektif. Apalagi dilihat dari aspek transparansi, masalah penganggaran masih belum terbuka dan terperinci kepada masyarakat baik mengenai alokasi anggarannya dan penggunaannya. Juga terhadap partisipasi masyarakat dan kontrol pemerintah masih kurang dalam pelaksanaannya, masih ditemukan pejabat publik yang terlambat saat menghadiri rapat Musrenbang.

Kata Kunci : Efektivitas, Musrenbang, Partisipasi Masyarakat



ABSTRACK

Nurul Islamiyah M, Government Science Studies Program, Faculty of Social Sciences and Political Science, Hasanuddin University, Prepared a Thesis with the title: The Effectiveness of Implementing Development Planning Consultations (Musrenbang) at the Minasa Te'ne Mukim Level, Minasa Te'ne District, Pangkajene and Kepulauan Regency (Guided by Dr. H. A. M. Rusli, M.Si and Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si). This study aims to find out the extent of the effectiveness of the implementation of Musrenbang in Minasa Te'ne Village, Pangkajene and Kepulauan Regency by studying systematically, integrated, transparent and responsible.

The method used in this research is a qualitative method, which describes the data and facts related to the problem and the unit being studied. By using techniques such as interviews, direct observation and participation as well as text analysis, this qualitative study is able to capture the nuances and complexity of the phenomenon under study.

The results of the study show that the implementation of Musrenbang in Minasa Te'ne Village is still not effective. Moreover, seen from the aspect of transparency, the budget problem is not yet open and detailed to the public whether the budget allocation and its use. Also regarding community participation and government control which is still lacking in implementation, public officials are still late when attending Musrenbang meetings.

Keywords: Effectiveness, Musrenbang, Community Participation



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang diketahui bersama, bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan kebijakan, dan evaluasi program pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan memungkinkan mereka untuk menyuarakan kepentingan, keprihatinan, dan pandangan mereka, dengan harapan bahwa para pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Paulo Freire, seorang teoretikus pendidikan kritis, menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga tugas moral. Konsep Freire tentang penyadaran, atau kesadaran kritis, merupakan inti dari perspektif ini. Penyadaran melibatkan pengembangan dalam hal kesadaran akan realita sosial dan mengambil tindakan menuju keadilan sosial (Reis et al., 2014:1604-1614).

Dalam perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik saat ini, bergantung pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memengaruhi kehidupan dan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana, jujur, dan



berkelanjutan. Pembebasan yang sejati hanya dapat dicapai ketika masyarakat memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri (Freina et al., 2015:429-444).

Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Musrenbang adalah forum demokratis di mana lembaga-lembaga pemerintah, pemangku kepentingan lokal, dan warga/masyarakat berkumpul untuk menentukan prioritas pembangunan dan masalah yang perlu ditangani di kelurahan mereka. Sesuai dengan perkataan Larry Bennett (2004: 187-214) Musrenbang merupakan wahana partisipasi masyarakat yang efektif untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang paling mendalam. Musrenbang di tingkat kelurahan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah setempat, sehingga memungkinkan warga untuk memiliki suara aktif dalam menentukan bagaimana sumber daya publik akan dialokasikan dan proyek pembangunan mana yang akan diutamakan. Dengan mengambil bagian dalam Musrenbang, masyarakat merasa terlibat dalam pembangunan di daerah mereka, yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dapat mengungkapkan keinginan mereka untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi yang mungkin lebih mendesak bagi kelurahan mereka saat mengadakan Musrenbang.



Musrenbang di tingkat kelurahan juga membuat pengelolaan sumber daya lebih jelas. Jika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan, kemungkinan korupsi dan

penyalahgunaan kekuasaan akan berkurang. Seperti pendapat Mahatma Gandhi bahwa partisipasi merupakan kunci kesuksesan dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi (Joseph & Reddy, 2021:51-73). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya Musrenbang di tingkat kelurahan, karena mewajibkan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Akibatnya, musrenbang di tingkat kelurahan bukan hanya menjadi alat yang efektif untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, tetapi juga merupakan alat yang diatur secara hukum untuk mendukung tata kelola masyarakat. Jadi, Musrenbang di tingkat kelurahan sangat penting untuk membangun masyarakat yang berpartisipasi, transparan, dan akuntabel. Ini membantu mewujudkan demokrasi yang inklusif dan pemerintahan yang berfokus pada kepentingan rakyat.

Tugas pemerintah dan seluruh warga negara adalah untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Untuk membuat masyarakat yang kuat dan inklusif, masyarakat harus aktif dan terlibat dalam menghadiri berbagai bentuk partisipasi, seperti pertemuan publik, penulisan petisi, dan berkontribusi pada organisasi/kelompok masyarakat yang berfokus pada isu-isu tertentu. Banyak gerakan sosial yang berhasil di seluruh dunia bergantung pada partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, kampanye aktif masyarakat untuk hak-hak sipil dan kesetaraan memicu Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat pada tahun 60-an. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menghasilkan gerakan sosial yang besar.



Dalam era teknologi informasi, partisipasi masyarakat telah berkembang ke ranah digital; alat teknologi seperti platform sosial media memungkinkan orang untuk berbicara, berbagi informasi, dan memengaruhi kebijakan. Namun, perlu diingat bahwa keterlibatan masyarakat dalam dunia digital juga menimbulkan masalah terkait dengan keamanan dan privasi informasi. Secara keseluruhan, jika kita ingin pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan, kita harus berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pilar utama dari demokrasi yang sehat seperti yang dikutip dari Pidato Gettysburg oleh Abraham Lincoln tentang demokrasi di mana ia mendeskripsikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (Conely, 2023:142-156).

Tantangan besar dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif adalah kurangnya efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Musrenbang dimaksudkan untuk menggali aspirasi masyarakat, menentukan prioritas, dan membagi sumber daya untuk pembangunan, tetapi beberapa faktor telah membuatnya tidak efektif. (Charles Sabel, 2005:337-446), seorang pakar tata kelola partisipatif, mengatakan, kegagalan Musrenbang dalam mencapai hasil yang diinginkan seringkali terkait dengan kurangnya partisipasi yang bermakna serta ketidakmampuan untuk mengintegrasikan pandangan masyarakat ke dalam kebijakan. Salah satu faktor yang menyebabkan Musrenbang di tingkat kelurahan tidak efektif adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses tersebut. Proses Musrenbang dapat terhambat oleh keterbatasan



akses informasi, kurangnya literasi politik, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Jadi, banyak masyarakat yang merasa hasil Musrenbang tidak menguntungkan mereka.

Selain itu, perbedaan kapasitas administrasi dan sumber daya antara kelurahan dapat menjadi hambatan. Kelurahan yang memiliki sumber daya terbatas kemungkinan untuk menghadapi kesulitan dalam melaksanakan Musrenbang dengan baik atau mengatur sumber dayanya secara tepat. Kondisi ini meningkatkan ketidaksetaraan dalam keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan. Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan Musrenbang. Jika Musrenbang tidak mendapatkan dukungan atau komitmen dari pemerintah daerah, itu hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa hasil yang nyata. Frances Cleaver (2002:11-30), seorang peneliti dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi, menyatakan bahwa pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan Musrenbang cenderung mereduksi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan.

Terakhir, aparat kelurahan harus tahu bagaimana melakukan Musrenbang yang inklusif dan bagaimana membantu orang berbicara tentang kebijakan dan mengintegrasikan berbagai pandangan masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan. Dalam situasi seperti ini, perbaikan pendidikan yang utan, pemahaman seluruh pemangku kepentingan, dan dukungan dari ah daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan ang di tingkat kelurahan.



Tidak efektifnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan memiliki dampak yang sangat besar dan dapat menghambat pertumbuhan komunitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Joseph Stiglitz (2002:163-182), pemenang Nobel Ilmu Ekonomi, mengatakan kegagalan dalam proses partisipatif dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang lebih besar, dan pada akhirnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Jika Musrenbang tidak berjalan dengan baik, ada beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi:

- a. Ketidakpuasan Masyarakat: Jika masyarakat tidak berpartisipasi dalam Musrenbang, mereka dapat merasa tidak dihargai dan tidak didengarkan oleh pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah setempat dan proses pembangunan.
- b. Perencanaan Pembangunan yang Tidak Akurat: Musrenbang yang tidak efektif mungkin gagal menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sumber daya dapat dialokasikan dengan tidak efektif dan program pembangunan dapat tidak memenuhi kebutuhan yang sebenarnya.
- c. Peningkatan Ketidaksetaraan: Ketidakpartisipasi atau kurangnya partisipasi dalam kelompok masyarakat tertentu dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pembangunan dan sumber daya. Ini dapat meningkatkan ketimpangan sosial.



: Akuntabilitas: Proses Musrenbang yang tidak transparan dan tidak adanya masyarakat di dalamnya dapat membuat pemerintah kurang

bertanggung jawab atas keputusan pembangunan yang mereka buat. Karena tidak ada partisipasi masyarakat, pemerintah mungkin tidak merasa bertanggung jawab atas kebijakan mereka.

- e. Potensi Konflik Sosial: Konflik sosial di tingkat kelurahan dapat dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat. Ketika warga merasa tidak terdengar, mereka mungkin mencari cara lain untuk menunjukkan kebutuhan dan kepentingan mereka, seperti demonstrasi atau protes.

Untuk mengatasi konsekuensi negatif tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Musrenbang, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, dan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Musrenbang, penulis menggunakan 4 poin penting menurut Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81), yaitu:

- a. Sistematis: setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan Standar Operasional Producer (SOP).
- b. Terpadu: setiap unsur perencanaan Musrenbang, memiliki keterkaitan yang



yang mendukung antar rencana yang ada dengan program yang disusun oleh pemerintah sebagai penanggungjawab.

- c. Transparan: proses perencanaan musrenbang tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh peserta Musrenbang baik itu usulan, kuantitas, dana pembangunan, hingga semua usulan prioritas yang perlu direalisasikan.
- d. Akuntabel: akuntabel yaitu pertanggungjawaban, setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta Musrenbang, seperti usulan prioritas hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kelurahan tersebut.

Akan tetapi masih banyak usulan masyarakat yang disepakati bersama dalam Musrenbang hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi. Sehingga pembangunan yang dibutuhkan daerah masih banyak yang belum terpenuhi.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah seorang masyarakat di kelurahan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ketika pra-riset dilakukan yaitu kepada Bapak Muh. Ridwan, terkait dengan pembangunan di lokasi mereka tinggal yang rentang terkena banjir ketika musim hujan tiba. Bapak Muh. Ridwan mengatakan:

“Di daerah ini hampir tiap tahun terkena banjir tapi pemerintah hingga saat ini tidak nampak pembangunan yang berarti untuk menangani masalah ini. kami berharap dari pihak pemerintah setidaknya memikirkan nasib masyarakat yang tinggal di pinggir kali (sungai), karena ketika musim hujan tiba dan banjir itu datang, ketinggiannya mencapai 1 meter lebih.”

(Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2023)



Sebenarnya masalah tersebut dapat diatasi apabila melihat dari tujuan yang itu sendiri yaitu menampung, menetapkan proyek prioritas yang

sesuai kebutuhan masyarakat dan menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber dana lainnya.

Dengan latar belakang tersebut, melalui Musrenbang sebagai mitra strategis dalam merangkum aspirasi masyarakat terkait pembangunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.*

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana sistematis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?"
2. Bagaimana keterpaduan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?"
3. Bagaimana transparansi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?"



4. Se jauh mana akuntabel dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menilai secara Sistematis di Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?"
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menilai secara Terpadu di Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?"
3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menilai secara Transparan di Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?"
4. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menilai secara Akuntabel di Kelurahan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?"



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1.4.1 Secara teoritis

Terhusus mengenai kajian aspek ilmu pemerintahan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan dengan menggali lebih dalam tentang proses perencanaan pembangunan daerah, partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik.

1.4.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau bahan wawamasukan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terutama untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan. Hal ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan hasil perencanaan pembangunan lokal.

1.4.3 Secara metodologis

Secara metodologis, hasil penelitian ini dapat memberikan arti pentingnya penelitian di bidang Musrenbang khususnya dalam menangani persoalan keefektifan dalam pelaksanaannya melalui sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta dapat melahirkan sikap dan pola pikir analitik, kritik dan

f bagi para praktisi dan peneliti di kemudian hari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan. Musrenbang adalah dasar dari prinsip demokrasi, dimana partisipasi masyarakat penting dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal pembangunan (rifaldi, 2021). Keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dapat menjadi forum partisipasi aktif untuk menyuarakan hak pada pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, karena program-program pembangunan yang akan disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan lebih relevan dan dapat diterima langsung oleh mereka (Lampasa, 2022:79-87).

Musrenbang baik dari tingkat desa/kelurahan dan kabupaten melibatkan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan yang sesuai dengan aturan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan daerah yang mengatur tentang tata cara dan tahapan pelaksanaan musrenbang terkait (Hamamah, 2020:833). Pemerintah



memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendinaskan musrenbang serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat diakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan (Arisandi,

2001). Selain itu, musrenbang juga melibatkan beberapa stakeholders dalam pelaksanaannya, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Komunikasi ini sangat penting dalam proses musrenbang, gunanya yaitu untuk memastikan adanya kesepahaman dan koordinasi yang baik sesama prioritas pembangunan (Sulaiman et al., 2015: 367).

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan pada musrenbang, seperti kurangnya keterampilan dan pengetahuan aparat pemerintah dalam penyelenggaraannya, kurangnya pemahaman mengenai manajemen yang baik, kurangnya efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan, juga kurangnya pengawasan dan pembinaan terkait pembangunan di desa/kelurahan (Nugroho et al., 2022:23). Dalam era digital saat ini, telah dikembangkan sebuah inovasi dalam Musrenbang yang di adopsi dari teknologi informasi seperti e-musrenbang (electronic Musrenbang). E-Musrenbang memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan usulan dan partisipasi masyarakat untuk mempermudah proses Musrenbang (Setyasa, 2019:12).

Musrenbang memiliki tujuan dan manfaat. Salah satu tujuannya ialah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang, pemastian perencanaan pembangunan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendekatan partisipatif dilakukan agar muncul transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi



ngambilan keputusan. Hal ini juga membantu membangun kepercayaan pemerintah dan masyarakat, dan menumbuhkan rasa kepemilikan dan keyakinan.

Tujuan Musrenbang lainnya ialah mengedepankan musyawarah dan mufakat sesuai amanat sila keempat Pancasila, serta menghindari konflik berkepanjangan. Melalui diskusi dan musyawarah ini, Musrenbang memungkinkan pemangku kepentingan untuk saling terbuka dengan masyarakat, bertukar pendapat, keprihatinan, dan mendiskusikan program prioritas. Proses inklusif ini mendorong kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dan menjembatangi kesenjangan, serta mendorong pengertian dan saling kerja sama antar keduanya.

Musrenbang juga bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, Musrenbang hadir untuk memastikan rencana pembangunan telah sesuai dengan konteks dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Pada pendekatan partisipatif ini dapat membantu mengidentifikasi, mengatasi permasalahan dan tantangan yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat. Hal ini juga dapat mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan pelaksanaan proyek pembangunan yang efektif. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai wadah pengetahuan dan kearifan lokal untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan. Tradisi lokal, simbol budaya, dan nilai-nilai masyarakat terdapat di dalam proses perencanaan Musrenbang ini, serta pengakuan terhadap kearifan lokal ini berkontribusi pada rencana pembangunan yang lebih peka budaya dan inklusif.



Musrenbang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan penganggaran pada proyek pembangunan (Purwaningsih, 2022:

151-164). Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berbeda-beda, dalam beberapa penelitian menunjukkan respon yang baik atau sangat baik (nurdin & syani, 2021). Partisipasi masyarakat dan peran pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan Musrenbang. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai wadah dan memfasilitasi serta mendukung partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan (Syani, 2021). Masyarakat dalam hal ini, memiliki peran dan kewenangan untuk mendukung Partisipasi dalam Musrenbang (Kause, 2020:12-19). Untuk menciptakan partisipatif yang efektif dapat dicapai dengan meningkatkan peran pemangku kepentingan, menyelaraskan usulan dengan aspirasi masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang berbasis digital (Saragih et al, 2022:317). Pada intinya, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang merupakan aspek penting dalam proses pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Nurzukhrufa et al., 2023:187-195)

Peran Pemerintah daerah sangat penting dalam Musrenbang. Pemerintah daerah, mulai dari tingkat kementerian hingga bupati mempunyai peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung proses Musrenbang (Zahrotunnimah, 2020: 247-260). Mereka mempunyai kekuasaan untuk mengambil kebijakan, memberikan arahan, dan mengawasi serta mendukung proses Musrenbang (Supriyanto & Fitria, 2022:44-51). Pemerintah daerah juga berperan dalam

dana serta fasilitator pada proyek pembangunan yang akan direncanakan et al., 2022:317). Efektivitas Musrenbang di tingkat daerah bergantung



pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah sebaiknya memposisikan diri sebagai mediator dan fasilitator antara masyarakat dengan proyek pembangunan (Supriyanto & Fitria, 2022:44-51). Dalam proses penganggaran pada perencanaan pembangunan penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, agar program yang diusulkan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Serta pemerintah daerah hendaknya mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai proyek pembangunan (Rahmadya & Sugiri, 2022:53-59). Secara keseluruhan, konsep Musrenbang didasarkan pada prinsip perencanaan partisipatif, dimana pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi, mendukung partisipasi masyarakat dan penganggaran dalam proses perencanaan. Efektivitas Musrenbang bergantung pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat serta pemerintah daerah perlu bertindak sebagai fasilitator dan mediator antara masyarakat dan proyek Pembangunan.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan individu atau kelompok dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kegiatan masyarakat, dan evaluasi kebijakan disebut dengan partisipasi masyarakat (Widadi & Eldo, 2023:109-120). Contoh partisipasi masyarakat termasuk perencanaan pembangunan (Adam et al., 2019:144-164), penataan ruang (Yuniartanti, 2022:12-29), edukasi publik (2023:631-644), dan peningkatan kualitas pendidikan (Jannah & Diana, 57). Perencanaan pembangunan maupun pemerintahan bergantung pada



partisipasi masyarakat. Dalam hal pembangunan, partisipasi masyarakat memungkinkan adanya proses pengambilan keputusan terkait kebijakan mengenai pembangunan yang akan direncanakan ("Application of the principles of good governance to the effectiveness of employee performance at the department of agriculture, food security, and fisheries, ponorogo regency", 2022). Ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak ada pelanggaran di dalamnya.

Salah satu prinsip pemerintahan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Pemerintahan yang baik melibatkan berbagai aspek, seperti transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pencegahan korupsi (Sumantri, 2022:63-72). Partisipasi masyarakat menjadi alat penting untuk menyebarkan informasi dan mendidik masyarakat (Zakaria, 2023:631-644). Partisipasi masyarakat memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, kepemimpinan pemerintahan dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang kuat dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Adam et al., 2019: 144-164). Selain itu, kemampuan organisasi keagamaan juga dapat membantu masyarakat berpartisipasi dalam masalah sosial (Saadah, 2023:79-98). Jadi, partisipasi masyarakat adalah partisipasi kelompok dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan menilai perubahan jadi dalam masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan dan ahan sangat penting, termasuk perencanaan pembangunan, penataan



ruang, edukasi publik, dan peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu prinsip utama good governance adalah partisipasi masyarakat, yang mencakup berbagai elemen seperti transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pencegahan korupsi. Tingkat partisipasi masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh elemen seperti kapasitas organisasi dan kepemimpinan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat harus didorong dan difasilitasi.

Fenomena partisipasi masyarakat sangat kompleks dan telah menarik perhatian dalam banyak lingkup, seperti politik, lingkungan, dan pembangunan. Ada banyak teori-teori yang berkembang untuk menganalisis mengenai partisipasi masyarakat. Teori Pilihan Publik (Public Choice) adalah salah satu teori yang membahas mengenai partisipasi masyarakat, yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses pengambilan keputusan politik yang didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan bersama. Penelitian tentang teori ini yaitu (Abady, 2013) mengatakan bahwa, tidak peduli teori apa pun, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tetap relevan.

Teori Literasi Politik Bernard Crick juga menjelaskan hubungan antara keduanya. Komponen sosial dan psikologis juga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Priyanti et al. (2021:758-769), kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan situasi sosial dan



di seseorang di masyarakat. Teori ini digunakan dalam untuk lisis hubungan antara kecemasan akademis dan dukungan sosial pada [K.

Faktor politik juga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo et al. (2020:152) mengatakan bahwa ada hubungan antara politik dan jenjang partisipasi bagi pemilih pemula. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan pembangunan juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menggunakan teori perencanaan partisipatif, seperti yang dijelaskan Abady (2013).

Untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, partisipasi dalam kegiatan dan proses pengambilan keputusan sangat penting untuk dilakukan. Apalagi untuk pemerintah dan peneliti agar dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kondisi ekonomi individu dan masyarakat adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam sebuah penelitian menunjukkan, jika ada ketimpangan ekonomi yang ditandai dengan perbedaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, partisipasi masyarakat dapat sangat berpengaruh. Karena masyarakat yang berlatar ekonomi rendah tidak memiliki sarana waktu dan finansial untuk mendapatkan sumber daya masyarakat atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial, orang dengan latar belakang sosial ekonomi rendah cenderung tidak terlibat dalam kegiatan sosial.

Selain itu, ketersediaan lapangan kerja dapat berdampak pada partisipasi masyarakat. Pengangguran dapat menimbulkan perasaan pengucilan sosial.

a, terjadi penarikan diri dari aktivitas sosial. Sebaliknya, orang-orang memiliki pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk membantu



organisasi lokal. Pada aspek pendidikan, mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih baik. Hal inilah yang menjadi peluang pada keterlibatan mereka pada masyarakat. Pendidikan memberikan individu kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada intinya, faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Ketimpangan ekonomi, kesempatan kerja, modal sosial, dan akses terhadap pendidikan semuanya berperan dalam membentuk keterlibatan individu dalam kegiatan masyarakat. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut ketika merancang intervensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, menumbuhkan modal sosial, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Menurut Hofstede, G. dalam bukunya yang berjudul "Culture's Consequences," (1980) berpendapat bahwa aspek masyarakat termasuk nilai-nilai manusia berhubungan dengan pekerjaan yang dilakoninya (Hofstede, 2011). Budaya dalam hal ini memainkan peran penting dalam



ikan perilaku dan sikap individu, termasuk tingkat partisipasinya dalam at. Menurut Hofstede, faktor budaya seperti individualisme garuhi sejauh mana seseorang dapat terlibat dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi dalam faktor politik. Penelitian oleh Farera & Alfikri (2022: 823-833) menunjukkan bahwa komunikasi politik yang searah, memiliki pengaruh positif terhadap partisipasinya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perilaku pemilih dapat memperkuat hubungan antara komunikasi politik dan partisipasi politiknya. Faktor kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga memengaruhi partisipasi politik. (Hemafitria dkk., 2021:37) mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang politik dan kepercayaannya terhadap pemerintah dapat mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam masyarakat.

2.3 Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai pengukuran dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Sileuw et al., 2022: 84). Efektivitas biasanya mengacu pada sejauh mana suatu usaha atau tindakan dapat mencapai hasil yang diharapkan atau dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya (Iasha, 2020:1-6). Efisiensi berfokus pada bagaimana suatu tindakan atau proses dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sebaik mungkin, sedangkan efektivitas menekankan pada sejauh mana hasil yang dihasilkan dari tindakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam banyak kasus, mencapai efektivitas yang tinggi memerlukan



nan efisiensi yang besar, begitupun sebaliknya. Sedangkan, menurut ini & Arif, 2022) Efektivitas adalah kemampuan suatu program,

kebijakan, atau tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang maksimal, mengukur sejauh mana suatu tujuan telah tercapai dengan efisien dan efektif. Ini berarti bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan, tetapi juga dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas juga berkaitan erat dengan korelasi antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang ingin dicapai (Farhana & Wardana, 2022:48-60).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas merupakan elemen-elemen kritis yang dapat memengaruhi sejauh mana suatu tindakan, program, atau proyek mencapai hasil yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh (Camillus & Diamantopoulos, 2018:67-80), "Efektivitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik suatu tindakan direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi eksekusi dan dampak yang dihasilkan." Faktor-faktor tersebut mencakup kepemimpinan yang efektif, partisipasi masyarakat yang aktif, ketersediaan sumber daya finansial yang memadai, kapasitas dan keahlian tim yang terlibat, kerjasama yang baik antara berbagai pihak, konteks sosial dan budaya lokal, pemantauan dan evaluasi yang sistematis, ketidakpastian lingkungan yang harus dihadapi, serta faktor-faktor politik yang mungkin mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan program.

Pentingnya efektivitas dalam perencanaan pembangunan mencerminkan nilai-nilai yang dimainkan oleh efektivitas dalam mencapai hasil-hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam pembangunan suatu masyarakat atau negara. Efektivitas dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk keberhasilan



memerangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Halimah & Karyana, 2017:74).

Efektivitas dalam konteks perencanaan pembangunan dapat diukur melalui sejumlah metode dan indikator yang membantu menggambarkan sejauh mana suatu program atau proyek berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas dalam perencanaan pembangunan adalah proses yang kompleks yang melibatkan identifikasi indikator kinerja, pengumpulan data, analisis dampak, dan perbandingan dengan tujuan awal untuk menilai sejauh mana program atau proyek telah mencapai hasil yang diinginkan.

2.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan

A. Faktor Kebijakan dan Perencanaan

Efektivitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh faktor perencanaan dan kebijakan. Kebijakan yang baik dan perencanaan yang matang adalah dasar penting untuk mencapai efektivitas dalam pembangunan (Brinkerhoff, 2005:335-346). Faktor ini memberikan arah, kerangka kerja, dan panduan yang jelas untuk tindakan pembangunan yang berhasil dan terkoordinasi.

Kebijakan yang baik harus menetapkan tujuan pembangunan yang jelas, efektif dan menetapkan kerangka hukum dan peraturan untuk mendukung tersebut. Selain itu, kebijakan harus responsif untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal. Perencanaan yang matang melibatkan



identifikasi cermat atas masalah yang ingin diatasi, analisis risiko dan peluang, alokasi sumber daya yang efisien, dan perincian langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang baik juga mempertimbangkan partisipasi masyarakat, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi.

Dalam perencanaan pembangunan, faktor kebijakan dan perencanaan berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk mencapai keberhasilan dan memastikan bahwa upaya pembangunan terarah, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan.

B. Faktor Manajemen dan Pelaksanaan

Efektivitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen dan pelaksanaan. (Nguyen et al., 2016) menyatakan bahwa manajemen yang efektif dan pelaksanaan yang baik adalah tulang punggung dari kesuksesan dalam pembangunan. Tanpa manajemen yang baik, perencanaan hanya akan menjadi sekumpulan ide, dan tanpa pelaksanaan yang baik, rencana-rencana tersebut akan tetap berada di atas kertas.

Pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, termasuk sumber daya finansial, manusia, dan fisik, adalah bagian dari manajemen yang efektif dalam perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang tepat waktu dan adaptif, strategi yang tepat, serta alokasi sumber

g efisien. Rencana pembangunan harus dilaksanakan melalui tindakan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal yang baik. Salah satu



contohnya adalah perbaikan berkelanjutan, evaluasi berkala, pemantauan yang berkelanjutan, dan koordinasi antar-stakeholder. Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan yang menentukan efektivitas adalah manajemen risiko dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan.

Untuk memastikan bahwa rencana pembangunan dapat diwujudkan dengan efektif dan memiliki efek yang signifikan, faktor-faktor manajemen dan pelaksanaan merupakan pilar penting dalam perencanaan pembangunan.

C. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bukan hanya prinsip demokrasi, tetapi juga fondasi bagi pembangunan yang efektif, karena masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan cenderung lebih memahami kebutuhan mereka dan berkontribusi pada implementasi rencana pembangunan dengan lebih baik (Narayan, 1995:225-248).

Dengan keterlibatan masyarakat, program atau proyek pembangunan memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima dan dilaksanakan dengan sukses. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, yang mencakup identifikasi masalah, pembuatan rencana, dan evaluasi program atau proyek. Hal ini meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat dan memungkinkan rencana pembangunan untuk lebih sesuai dengan realitas lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat menciptakan

jawab bersama antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Ini meningkatkan kepemilikan lokal terhadap rencana pembangunan



dan dapat mendorong partisipasi aktif dalam pemantauan dan evaluasi program, yang menghasilkan rencana pembangunan yang lebih efektif secara keseluruhan.

D. Faktor Konteks dan Kapasitas Institusi

Efektivitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh faktor konteks dan kapasitas institusi. Baharuddin (2021) menyatakan, konteks dan kapasitas institusi yang kuat adalah dua pilar utama yang membentuk kerangka kerja untuk perencanaan pembangunan yang efektif, karena setiap negara atau wilayah memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan lembaga-lembaga yang kompeten dan kuat adalah dasar bagi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sejauh mana rencana pembangunan dapat berhasil dipengaruhi oleh lingkungan lokal, termasuk keadaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal dan masalah yang ada. Sebaliknya, kapasitas institusi melibatkan kemampuan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan. Kapasitas institusi yang kuat memastikan bahwa rencana tersebut dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Faktor-faktor konteks dan kapasitas institusi adalah komponen penting yang harus diperhitungkan saat merencanakan pembangunan. Mereka memastikan bahwa rencana pembangunan dapat dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten dan mencerminkan kondisi lokal yang sebenarnya.

E. Faktor Pengukuran dan Evaluasi



Pengukuran dan evaluasi yang baik adalah elemen esensial dalam proses pembangunan, karena mereka memberikan landasan objektif untuk

menilai sejauh mana program atau proyek telah mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi, indikator kinerja yang jelas dan teknik pengumpulan data yang akurat diperlukan. Hal ini memungkinkan pengawasan yang sistematis terhadap kemajuan rencana pembangunan selama pelaksanaan. Dengan data yang kuat, perencana dapat menilai efek dari tindakan yang diambil dan membuat perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Evaluasi juga penting untuk belajar dari pengalaman. Dengan melihat apa yang telah dilakukan dan apa yang tidak, perencana pembangunan dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk rencana yang akan datang. Ini memungkinkan perencanaan pembangunan menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam konteks masyarakat dan kebutuhannya.

Dalam perencanaan pembangunan, faktor pengukuran dan evaluasi memastikan bahwa rencana pembangunan tidak hanya ide-ide yang bagus di atas kertas, tetapi juga upaya yang memiliki dampak nyata. Faktor-faktor ini membentuk dasar bagi pengambilan keputusan yang informasional dan berorientasi pada hasil.

2.3.2 Pendekatan untuk mengukur Efektivitas

Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang berdasarkan teori Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) yang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan

memiliki beberapa unsur, yaitu:



A. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP) Musrenbang Kelurahan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis akan didapatkan 10 usulan yang disepakati, selanjutnya dari 10 usulan tersebut diajukan ke Kecamatan, dari Musrenbang Kecamatan kemudian ditentukan takar urgensinya untuk menjadi 5 usulan prioritas yang selanjutnya akan diajukan pada Forum Musrenbang RKPD Kabupaten.

B. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur dalam pelaksanaan perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kelurahan memiliki keterkaitan antara program yang satu dengan lainnya, baik dari segi alokasi pelaksanaan, waktu, tempat, kualitas maupun sumber pendanaannya. Ataupun, dari segi rencana yang ada dengan program yang dimiliki saling memiliki keterkaitan. Sehingga, tidak akan ditemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.

C. Transparan

Transparansi yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kelurahan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu

ikan.



D. Akuntabel

Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kelurahan Minasa Te'ne, seperti usulan-usulan dari tiap RW/RT hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang Kelurahan tersebut.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu mengacu pada teori Riant Nugroho & Wrihatnolo (2011:81) yaitu efektivitas penyelenggaraan musrenbang, memiliki beberapa unsur, diantaranya: Sistematis, Terpadu, Transparan dan Akuntabel.



Berdasarkan keempat faktor tersebut, secara langsung akan memberikan dampak pada keefektifitasan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

